

PENGABDIAN MASYARAKAT

**MARAKNYA AKSI PUNGUTAN LIAR (PUNGLI) YANG DILAKUKAN
OLEH OKNUM BIROKRAT ATAU PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM
SEBUAH BIROKRASI PEMERINTAH**



Oleh :

Nanik Pujiastuti
19610425 198703 2 002

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA
2014**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Abdimas : Maraknya Aksi Pungutan Liar (Pungli) Yang Dilakukan Oleh Oknum Birokrat Atau Pegawai Negeri Sipil Dalam Sebuah Birokrasi Pemerintah
Jenis Insentif : --
Nama Peneliti : Nanik Pujiastuti
NIP : 19610425 198703 2 002
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Nomor HP : 08125507209
Alamat Surel (gmail) : nanik.pujiastuti25@gmail.com
Sumber Pendanaan : Rp 4.000.000,-

Samarinda, Januari 2014

Mengetahui
Dekan,

Dosen Peneliti,

Drs.Damai Darmadi, M,Si
NIP. 19570504 198601 1 001

Nanik Pujiastuti
NIP. 19610425 198703 2 002

Menyetujui,
Ketua LPPM

Prof. Dr. FL. Sudiran, M.Si
NIP. 19480921 197503 1 001

SURAT TUGAS
Nomor : /UN.17/LP3M/2014

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Prof. Dr. Fl. Sudiran, M.Si
NIP : 19480921 197503 1 001
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Universitas 17 Agustus 1945

Dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bah :

Nama : Nanik Pujiastuti
NIP / NIDN : 19610425 198703 2 002 / 0025046102
Fakultas / Prodi : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Judul Abdimas : Maraknya Aksi Pungutan Liar (Pungli) Yang Dilakukan Oleh Oknum Birokrat Atau Pegawai Negeri Sipil Dalam Sebuah Birokrasi Pemerintah

Untuk melaksanakan pengabdian masyarakat dengan judul diatas, dan akan memberikan laporan akhir penelitian ke LPPM Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda,
Ketua LPPM,

Prof. Dr. FL. Sudiran, M.Si.
NIP.19480921 197503 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam penulisan ini saya ingin membahas atau mengupas tentang perilaku birokrasi pemerintahan yang ada di Negara kita, apa yang kita harapkan dari sebuah birokrasi tentu yang kita harapkan adalah terciptanya birokrasi yang bersih, adil, dan bijaksana. Tapi apa faktanya yang terjadi sekarang ini Birokrasi-birokrasi pemerintah baik itu dari tingkat pusat, propinsi, hingga kabupaten banyak sekali dipolitisasi dan sangat jauh dari *kata bersih* dan sesuai dari apa yang kita harapkan. Sejauh ini yang saya lihat dan fakta-fakta yang telah terjadi ialah kebanyakan birokrasi hanya dijadikan alat atau sarana untuk para birokrat atau oknum tertentu mencari keuntungan tertentu, di sini saya ingin mengambil contoh kecil yakni maraknya terjadi pungutan liar di dalam sebuah birokrasi pemerintah yang dilakukan oleh para oknum birokrat/pegawai.

Jika kita berbicara masalah birokrasi tentu yang kita tahu birokrasi pemerintah diciptakan ialah sebagai wadah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan bukan sebaliknya mengambil keuntungan dari masyarakat. Di Indonesia sendiri terdapat banyak sekali birokrasi pemerintah yang dibentuk tentunya untuk melayani masyarakat di bidangnya masing-

masing baik itu dari tingkat pusat, propinsi, kabupaten, kecamatan, hingga kelurahan/desa, dan rukun tetangga (RT).Adapun itu semua dibentuk atau diciptakan untuk mengatur masyarakat dan memenuhi segala kebutuhan masyarakat dalam beradministrasi sehingga tidak terjadinya kesemerautan di dalam tatanan masyarakat dan masyarakat bisa memiliki status yang jelas. Status yang jelas di sini saya ambil contoh : sedikit adalah dikarenakan setiap masyarakat diwajibkan harus memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kelahiran (KAK). Hal ini semua dilakukan adalah untuk memperjelas status kita sebagai masyarakat dan sebagai warga Negara yang sah di Revublik Indonesia.Dan untuk mendapatkan segala persyaratan di atas maka kita harus mengurus itu semua ke kantor Pencatatan Sipil (CAPIL) dan melengkapi segala proses administrasi yang diperlukan. Ironisnya yang terjadi sekarang ini dan realita yang pernah saya alami sendiri adalah adanya terjadi pungutan liar (PUNGLI) di dalam sebuah birokrasi itu sendiri yang dilakukan oleh Oknum-oknum tertentu. Untuk melakukan aksi pungutan liar para pelaku banyak sekali memiliki cara dan terik-terik yang jitu agar kita mau membayar dan memenuhi keinginan mereka, salah satu contoh yang pernah saya alami adalah dengan cara mempermudah proses administrasi yang tadinya membutuhkan waktu berminggu-minggu bisa disulap menjadi 1 jam. Dari apa yang pernah saya alami,dari apa yang saya lihat, dan apa yang telah saya dengar dari

pengakuan teman-teman, keluarga atau orang lain ternyata hal seperti ini tidak hanya terjadi di sebuah instansi atau birokrasi melainkan hampir di setiap instansi pemerintahan selalu terjadi hal seperti itu dan selalu ada celah atau ruang kosong yang bisa dimanfaatkan oleh Oknum-oknum tertentu untuk mendapatkan keuntungan yang sejujurnya merugikan masyarakat mungkin bagi masyarakat yang memiliki uang banyak dan harta yang berlimpah hal semacam ini dianggap biasa-biasa saja akan tetapi bagi orang yang tidak mampu hal semacam ini akan sangat memberatkan dalam kehidupan mereka. Oleh sebab itu saya membuat mekalah ini dan berharap agar terciptanya sebuah birokrasi yang bersih, adil, dan jujur tanpa adanya pungutan liar dan tanpa pelayanan yang pilih kasih sehingga terkesan ada uang urunan lancar. Untuk mencapai apa yang saya inginkan saya selaku penulis sangat berharap kesadaran masyarakat dan para aparatur Negara agar menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dan bertanggung jawab atas amanah yang telah diberikan.

B. Perumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka perumusan masalah dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bagaimana cara yang tepat untuk menyelesaikan masalah pungutan liar dalam sebuah birokrasi pemerintah agar tidak terus berulang ?

2. Apakah pemerintah birokrasi yang terkait akan terus diam tanpa adanya tindakan untuk mengatasi masalah ini ?
3. Apakah masalah seperti ini berlaku disetiap birokrasi pemerintah dan faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pungli ?

C. Maksud dan Tujuan

Atas apa yang telah terurai di atas saya selaku penulis makalah ini bermaksud agar kinerja dan citar birokrasi pemerintah untuk kedepannya tidak lagi dipandang buruk oleh masyarakat, dan tujuan penulis membuat makalah ini adalah sebagai berikut :

1. Ingin mengkritik kinerja sebuah birokrasi pemerintah yang kita lihat selama ini sering kali melakukan kesalahan-kesalahan yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di dalam birokrasi itu sendiri.
2. Ingin mencoba memberikan pendapat atau saran bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah di atas agar tidak terulang kembali.
3. meminta agar kita sebagai warga Negara yang baik ikut berperan aktif dalam hal membantu pemerintah untuk membasmi apapun setiap tindakan kejahatan yang terjadi di dalam birokrasi dan berharap pemerintah lebih aktif dan gesit dalam memberantas sekecil apapun tidak kejahatan itu sendiri tanpa berpangku tangan dan seolah-olah tidak

melihat apa yang telah terjadi serta memberikan sanksi yang tegas tanpa pandang bulu.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Peran Birokrasi Dalam Pemerintah Modern

Menurut Michael G. Roskin, et al. Menyebutkan bahwa Sekarang-kurangnya ada empat (4) fungsi birokrasi di dalam suatu birokrasi pemerintahan modern Fungsi-fungsi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Administrasi

Fungsi administrasi pemerintahan modern meliputi , pelayanan, pengaturan, perizinan, dan pengumpul informasi. Dengan fungsi administrasi dimaksudkan bahwa fungsi sebuah birokrasi adalah mengimplementasikan Undang-undang yang telah disusun oleh legislative serta penafsiran atas UU tersebut oleh eksekutif. Dengan demikian administrasi berarti pelaksanaan kebijakan umum suatu Negara, dimana kebijakan umum itu sendiri telah dirancang sedemikian rupa guna mencapai suatu tujuan Negara secara keseluruhan.

2. Pelayanan

Birokrasi sesungguhnya diarahkan untuk melayani masyarakat atau kelompok-kelompok khusus. Badan meteorologi dan Geofisika (BMG) di Indonesia merupakan contoh yang bagus untuk hal ini,

dimana badan tersebut ditunjukkan untuk melayani kepentingan masyarakat yang akan melakukan perjalanan atau mengungsikan diri dari kemungkinan bencana alam. Untuk batas-batas tertentu, beberapa korporasi Negara seperti PJKA atau jawatan POS dan Telekomunikasi menjalankan fungsi public service ini.

3. Pengaturan (Regulation)

Fungsi pengaturan dari suatu pemerintahan biasanya dirancang demi mengamankan kesejahteraan masyarakat. Dalam menjalankan fungsi ini, badan birokrasi biasanya dihadapkan diantara dua pilihan yakni kepentingan Individu atau kepentingan masyarakat banyak. Badan birokrasi Negara biasanya diperhadapkan pada dua pilihan ini.

4. Pengumpul Informasi (Information Gathering)

Informasi dibutuhkan berdasarkan dua tujuan pokok. Apakah suatu kebijaksanaan mengalami sejumlah pelanggaran atau keperluan membuat kebijakan-kebijakan baru yang akan disusun oleh pemerintah berdasarkan factual. Badan birokrasi, oleh sebab itu menjadi ujung tombak pelaksanaan kebijaksanaan Negara tentu menyediakan data-data sehubungan dengan dua hal tersebut misalnya, pemungutan uang yang tidak semestinya (pungli) ketika masyarakat membuat KTP, KK, ataupun KAK tentunya mengalami pembengkakan. Pungli tersebut merupakan pelanggaran atas

idealisme administrasi Negara, oleh sebab itu harus ditindak. Dengan ditentukannya bukti pungli, pemerintah dituntut membuat prosedur baru untuk pembuatan KTP, KK, dan juga KAK agar tidak member ruang bagi kesempatan melakukan pungli.

B. Teori Kelemahan dan Problema dalam Birokrasi

Kelemahan dan problema dalam Birokrasi menurut Kettner meliputi beberapa hal yakni :

1. Kelemahan birokrasi terletak dalam hal :
 - a) Peran standar efisiensi yang dapat dilaksanakan secara fungsional
 - b) Terlalu menekan aspek-aspek rasionalitas, impersonalitas, dan hirarki
 - c) Kecendrungan birokrat untuk menyelewengkan tujuan-tujuan birokrasi
 - d) Berlakunya pita merah dalam kehidupan organisasi
2. Usaha untuk memperbaiki penampilan diajukan dalam bentuk teori birokrasi system perwakilan. Asumsi yang dipergunakan adalah bahwa birokrat dipengaruhi oleh pandangan nilai-nilai kelompok social dari mana ia berasal. Pada gilirannya aktivitas administrasi diorientasikan pada kepentingan kelompok sosialnya. Sementara itu control internal

tidak dapat dijalankan. Sehingga dengan birokrasi sistem perwakilan diharapkan dapat diterapkan mekanisme kontrol internal. Teori birokrasi system perwakilan secara konseptual amat merangsang, tetapi tidak mungkin untuk diterapkan. Karena teori ini tidak realistis, tidak jelas criteria keperwakilan, emosional dan mengabaikan peran pendidikan.

3. Kenggan untuk mengakui adanya konflik di antara otorita yang disusun secara hirarkis dan sulit menghubungkan proses birokrasi dengan modernisasi yang berlangsung di Negara-negara sedang berkembang.

C. Teori Birokratisme

Pengertian birokratisme mengacu pada sifat keterpakuan pada rutinitas, penolakan terhadap inovasi, kenggan memikul tanggung jawab, kekakuan dalam menerapkan aturan, dan kecendrungan menunda pekerjaan Darwan Raharjo Prisma (1986). Selain sebagai acuan pemahaman, pengertian ini dapat juga dijadikan pegangan dalam evaluasi dan perbaikan. Contoh gampang saja, bila seharusnya di kantor pencatatan sipil untuk membuat KTP hanya membutuhkan waktu 1 minggu, namun pada kenyataannya ternyata lebih lama dan untuk mendapatkan KTP agar lebih cepat kita harus membayar lebih kepada oknum tertentu, itu termasuk

birokratisme. Kalau bahkan lebih cepat itu juga termasuk birokratisme. Birokratisme adalah sebuah keburukan yang terdefinisi dengan baik, sebuah pelencengan yang buruk dan berbahaya, yang telah dikutuk secara resmi namun tetap tidak menunjukkan tanda-tanda akan melenyap. Ini lah realita yang terjadi sekarang ini terhadap birokrasi pemerintah kita.

D. Pelayanan Publik

Kegiatan pelayanan pada dasarnya menyangkut pemenuhan suatu hal yang melekat pada setiap orang baik secara pribadi maupun kelompok yang dilakukan secara Universal. Pelayanan merupakan suatu tindakan untuk memenuhi kebutuhan orang lain (konsumen, pelanggan, tamu, klien, pasien, penumpang dan lain-lain) yang tingkat pemuasannya dapat dirasakan oleh orang yang melayani maupun yang dilayani. Hal ini terjadi komunikasi batin antara kedua pihak dan kepuasan yang diperoleh tergantung pada situasinya saat terjadi interaksi pelayanan tersebut Takrim (2005). Pengertian pelayanan publik tidak terlepas dari kepentingan umum. Pelayanan publik dapat diartikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintahan di Pusat, Daerah, dan di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan Perundang-

undangan. Berdasarkan organisasi yang menjalankannya, pelayanan publik dapat dibedakan menjadi dua yaitu pelayanan publik yang diselenggarakan oleh organisasi Privat dan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh organisasi publik Wikipedia (2008). Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh organisasi Privat adalah semua penyediaan barang atau jasa publik yang diselenggarakan oleh swasta, seperti Rumah Sakit Swasta, Perguruan Tinggi Swasta, perusahaan pengangkutan swasta, dan lain sebagainya. Sedangkan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh organisasi publik adalah semua penyediaan barang atau jasa publik yang diselenggarakan oleh pemerintah. Ada lima karakteristik yang dapat dipakai untuk membedakan jenis penyelenggaraan pelayanan publik tersebut Wikipedia (2008), yaitu :

- a) Adaptabilitas layanan. Ini berarti derajat perubahan layanan sesuai dengan tuntutan perubahan yang diminta oleh pengguna.
- b) Posisi tawar pengguna/klien. Semakin tinggi posisi tawar pengguna/klien, maka akan semakin tinggi pula peluang pengguna untuk meminta pelayanan yang lebih baik.
- c) Tipe pasar. Karakteristik ini menggambarkan jumlah penyelenggara pelayanan yang ada, dan hubungannya dengan pengguna/klien.

- d) Locus kontrol. Karakteristik ini menjelaskan siapa yang memegang kontrol atas transaksi, apakah pengguna ataukah penyelenggara pelayanan.
- e) Sifat pelayanan. Hal ini menunjukkan kepentingan pengguna atau penyelenggara pelayanan yang lebih dominan

Pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah daerah akan mempengaruhi minat para investor dalam menanamkan modalnya di suatu daerah. Excelent Service harus menjadi acuan dalam mendisain struktur organisasi di pemerintah daerah. Dunia usaha menginginkan pelayanan yang cepat, tepat, mudah dan murah serta tarif yang jelas dan pasti. Pemerintah perlu menyusun Standar pelayananan bagi setiap institusi (Dinas) di daerah yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat, utamanya dinas yang mengeluarkan perizinan bagi pelaku bsinis. Perizinan berbagai sektor usaha harus di desain sedemikian rupa agar pengusaha tidak membutuhkan waktu terlalu lama untuk mengurus izin usaha, sehingga tidak mengorbankan waktu dan biaya besar hanya untuk mengurus perizinan. Deregulasi dan Debirokratisasi mutlak harus terus menerus dilakukan oleh Pemda, serta perlu dilakukan evaluasi secara berkala agar pelanan publik senantiasa memuaskan masyarakat. Dengan demikian pelayanan memegang peranan yang sangat penting dalam menjaga loyalitas konsumen, demikian pula hal

nya pelayanan yang diberikan oleh pemda kepada para pelaku bisnis. Bila merasa tidak mendapat pelayanan yang memuaskan maka mereka akan dengan segera mencari daerah lain yang lebih kompetitif untuk memindahkan usahanya.

Menurut Irawan (2002) dalam Muchsen (2007), indikator kualitas pelayanan menurut pelanggan ada 5 dimensi berikut :

- a. Tangibles : kualitas pelayanan berupa sarana fisik kantor, komputerisasi administrasi, ruang tunggu, tempat informasi dan sebagainya.
- b. Reliability : kemampuan dan kehandalan dalam menyediakan pelayanan yang terpercaya.
- c. Responsiveness : Kesanggupan untuk membantu dan menyediakan pelayanan secara cepat dan tepat serta tanggap dalam keinginan konsumen.
- d. Assurance : Kemampuan dan keramahan serta sopan santun dalam menyajikan kepercayaan konsumen.
- e. Emphaty : Sikap tegas tetapi ramah dalam memberikan pelayanan kepada konsmen.

Permasalahan utama pelayanan publik pada dasarnya berkaitan dengan kualitas pelayanan itu sendiri. Menurut Mohamad (2003), Pelayanan berkualitas tergantung pada berbagai aspek, yaitu sisi pola

penyelenggaraannya, pelayanan publik masih memiliki beberapa kelemahan antara lain :

1. Kurang responsif
2. Kurang informatif
3. Kurang accessible dan in efisiensi
4. Birokratis
5. Kurang mau mendengar keluhan/saran/ dan aspirasi masyarakat

BAB III

PEMBAHASAN

Berdasarkan latar belakang masalah di atas saya ingin membahas tentang kinerja birokrasi pemerintah yang belakangan ini marak sekali terjadinya penyelewengan dan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh para birokrat baik itu dari para pimpinan birokrasi dan juga para pegawainya. Sejauh ini saya ingin membahas tentang birokrasi pencatatan sipil yang para pegawainya seringkali melakukan aksi pungutan liar dalam pengurusan KTP, KK, KAK, dan juga pengurusan administrasi lainnya yang bisa mereka manfaatkan untuk mendapatkan keuntungan untuk memperkaya diri, dan pada dasarnya mereka sadar kalau saja hal tersebut adalah tindakan kejahatan yang bertentangan dengan hukum dan melanggar aturan-aturan yang berlaku dalam birokrasi itu sendiri. Di Indonesia sendiri PUNGLI sepertinya sudah menjadi suatu budaya yang tidak bisa dipisahkan dalam sebuah birokrasi pemerintah, karena menurut saya budaya masyarakat Indonesia kebanyakan lebih mementingkan kerakusan untuk mementingkan diri sendiri dan selalu mencari cara bagaimana untuk memperkaya diri sendiri walaupun dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum dan Agama. Ini lah yang menjadi permasalahan kita semua sebagai masyarakat Indonesia bagaimana caranya agar kita lebih membudayakan sifat yang

saling mengasihi, berbagi, dan saling menghargai satu dengan yang lainnya. Di Kalimantan Timur sendiri dari beberapa informasi yang saya dapat ternyata aksi PUNGLI bukan hanya terjadi pada birokrasi Pencatatan sipil saja melainkan hampir di seluruh birokrasi pemerintah yang, baik itu dari Lembaga eksekutif, legislative, dan juga yudikatif. Hal ini sangatlah ironis dan sangat buruk bagi kinerja birokrasi pemerintah di mata masyarakat dan menimbulkan rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap kinerja para birokrat yang tidak profesional dan berimbas pada nama baik birokrasi itu sendiri. Dari apa yang telah saya lihat sejauh ini ada beberapa faktor yang menyebabkan pungli itu terjadi :

1. Tidak selektifnya sebuah birokrasi dalam merekrut seorang calon birokrat/pegawai
2. Buruknya moral para pegawai baik itu dari atasan hingga ke pada bawahan sehingga dengan sehingga dengan sangat mudahnya menyalah gunakan kewenangan dan kedudukan sebagai pelayan masyarakat
3. Kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan terhadap bawahannya
4. Tidak berjalannya system yang ada dalam sebuah birokrasi sehingga menyebabkan adanya ruang kosong yang dapat dimanfaatkan oleh para oknum birokrat yang tidak bertanggung jawab

5. Tidak adanya sanksi keras yang diberikan terhadap para oknum birokrat yang melakukan pungli sehingga hal seperti ini terkesan dibiarkan saja tanpa adanya tindakan yang tegas
6. Kurangnya pendapatan yang didapat oleh para pegawai negeri, mengingat sekarang ini tingkat kebutuhan hidup yang tinggi sehingga memaksa para pegawai harus melakukan pungli untuk menutupi kekurangan yang terjadi

Dari beberapa faktor di atas pemerintah mestinya harus segera berbenah diri terhadap segala birokrasi pemerintah yang ada untuk menghindari segala kemungkinan-kemungkinan terjadinya praktek pungli agar tidak semakin meluas dan menjamur dalam sebuah birokrasi pemerintah. Dan tidak menutup kemungkinan akan terjadi permasalahan yang baru lagi dalam birokrasi, sejauh ini ada banyak sekali permasalahan yang terjadi di sebuah birokrasi pemerintah yang ada di Kabupaten Kutai Barat. Sebagai suatu contoh : Buruknya pelayanan sebuah birokrasi terhadap masyarakat, maraknya terjadi pungli, maraknya terjadi kasus korupsi yang hingga saat ini masih terselubung dan sulit untuk diungkap, dan sering terjadinya kasus suap yang dilakukan oleh para pengusaha tambang yang ada di seluruh Kalimantan Timur terhadap pimpinan sebuah birokrasi, dan masih banyak kasus-kasus lain yang sangat memprihatinkan. Apapun permasalahan yang terjadi dalam sebuah birokrasi sekarang ini saya selaku penulis sangat

mengharapkan agar pemerintah lebih sigap dan cepat untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, khususnya masalah PUNGLI agar tidak lagi merugikan masyarakat. Di sini saya ingin memberikan pendapat bagaimana untuk mengatasi masalah PUNGLI, berkaitan dengan beberapa factor diatas adapun cara atau jalan yang harus ditempuh atau dilakukan oleh pemerintah adalah :

1. Lebih jeli dalam melakukan seleksi calon pegawai negeri
2. Meningkatkan mutu moral para pegawai, karna moral yang baik akan sangat berpengaruh terhadap tingkah laku para pegawai
3. Meningkatkan pengawasan terhadap para pegawai untuk mempersempit ruang lingkup pegawai dalam melakukan tindakan kejahatan
4. Memperbaiki system yang berlaku dalam sebuah birokrasi
5. Jangan pernah ragu untuk memberikan sanksi yang tegas terhadap para pegawai yang terbukti melakukan tindakan kejahatan dalam bentuk apapun tanpa pilih kasih
6. Meningkatkan kesejahteraan para pegawai sesuai dengan kebutuhan hidup sekarang ini

Jika kita berbicara tentang birokrasi tidak akan lepas dari peran seorang birokrat yang bertugas untuk menjalankan proses administrasi, karna tanpa para birokrat atau pegawai tentu sebuah birokrasi tidak akan berjalan. Oleh

sebab itu sangatlah dibutuhkan sosok seorang pemimpin dan para pegawai yang benar-benar bertanggung jawab, jujur, adil, dan bijaksana dalam menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya. Dan bukan malah sebaliknya seperti sekarang ini yang terjadi justru kebanyakan para pimpinan birokrasi pemerintah dan para pegawainya mengambil kesempatan untuk melakukan aksi-aksi kejahatan yang tentunya menyimpang dari aturan-aturan yang berlaku di dalam birokrasi itu sendiri. Disini sangatlah dibutuhkan peran pemerintah, masyarakat, dan para penegak hukum yang terkait dalam melakukan penegakan hukum kepada para oknum Aparatur Negara yang tidak bertanggung jawab serta memberikan sanksi dan hukuman yang seberat-beratnya agar memberikan efek jera terhadap aparatur Negara yang telah terbukti melakukan kesalahan. Sejauh ini masalah-masalah yang terjadi di dalam sebuah birokrasi pemerintah sering kali terulang kembali, hal ini dikarenakan tidak tegasnya pemerintah dan para penegak hukum yang ada di Indonesia dalam menjalankan tugasnya dan hukuman-hukuman yang diberikan kebanyakan sangatlah ringan tidak sesuai dengan kejahatan yang telah mereka lakukan sehingga tidak memberikan efek jera terhadap oknum-oknum lain yang masih berkeliaran. Dan saya selaku penulis makalah ini ingin menghimbau kepada seluruh masyarakat agar berperan aktif dalam membantu pemerintah dan para penegak hukum dalam memberikan informasi apabila kita menemukan adanya kesalahan-kesalahan yang

dilakukan oleh aparaturnegara dan terbukti melakukan pelanggaran hukum apapun masalahnya dan siapapun orangnya jangan pernah ragu atau takut untuk melaporkannya kepada pihak-pihak yang berwajib. Sejauh ini yang saya lihat kebanyakan masyarakat takut dan tidak mau berurusan kepada pihak yang berwenang (Polisi) sehingga membiarkan saja permasalahan itu terjadi dan salah satu contoh yang saya bahas dalam makalah ini adalah kasus PUNGLI yang dilakukan oleh oknum-oknum pegawai Birokrasi Pencatatan Sipil yang ada di Kalimantan Timur dan tidak menutup kemungkinan PUNGLI tidak hanya ada di birokrasi pencatatan sipil saja melainkan di seluruh birokrasi pemerintah yang ada di seluruh Indonesia.

BAB IV

PENUTUP

A.Kesimpulan

Pada kesimpulan makalah ini saya selaku penulis ingin berkesimpulan, bahwa pada dasarnya sebuah birokrasi pemerintah itu tidak ada yang tidak baik. Karena birokrasi pemerintah dibentuk untuk memberikan Keamanan, pelayanan public dalam proses administrasi, dan lain sebagainya. Namun yang membuat birokrasi itu menjadi buruk atau tidak baik dimata masyarakat adalah disebabkan oleh ulah para birokrat atau oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang menjadikan sebuah birokrasi sebagai wadah untuk mendapatkan kesempatan melakukan tindakan kejahatan yang sifatnya memperkaya diri sendiri tanpa menyadari apa tujuan dan fungsi dari birokrasi itu sendiri dibentuk, dan tanpa memikirkan apa tanggung jawab mereka sebagai abdi Negara yang diberikan tanggung jawab dan kewenangan untuk melayani masyarakat dan bukan malah sebaliknya mengambil keuntungan dari masyarakat dengan cara-cara yang sangat merugikan masyarakat luas.

B. Saran

Disini penulis ingin memberikan sedikit saran khususnya ditujukan kepada seluruh abdi Negara baik itu dari para pejabat yang tertinggi hingga kepada para pegawai negeri sipil biasa agar kiranya menjalankan tugas dan kewajibannya sebagaimana mestinya. Karena seorang abdi Negara adalah mengemban sebuah tugas yang mulia yang diberikan oleh Tuhan dan tumbuh berdasarkan suara dan doa dari seluruh rakyat Indonesia, oleh sebab itu sekali lagi saya menghimbau agar kiranya setiap pejabat Negara maupun para pegawai agar menjalani tugas mulia ini dengan menggunakan hati nurani yang bersih dan menjunjung tinggi azas keadilan, jujur, dan bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

1. Priyo Budi. 1993. Birokrasi Pemerintah Orde Baru. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada.
2. Peter. M, dan Marshall M. Meyer. 2000. Birokrasi dalam Masyarakat Modern : Terjemahan Prestasi Pustakarya. Jakarta.
3. Robert H.2000. Dari Amoral sampai Birokrasi Humanisme. Prestasi Pustakarya. Jakarta.
4. Dwiyanto, Agus dkk. 2006. Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia. Gajah Mada University Press.
5. Lukman, Sampara. 2000. Manajemen Kualitas Pelayanan. STIA-LAN Press.Jakarta.